

Ahok Mulai Resah

APBD Belum Diperiksa Kemendagri

APBD Belum Diperiksa Kemendagri

GUBERNUR DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) nampaknya mulai khawatir dengan nasib Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2015. Orang nomor satu di ibukota itu mengimbau Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menerima, serta mengevaluasi berkas anggaran yang dikirimkan Pemprov DKI.

"Cepat-lamanya pencairan APBD mempengaruhi program unggulan berjalan. Sekarang Mendagri mau terima atau tidak APBD dengan format e-budgeting. Tadi kami sudah mengembalikan lagi (revisi APBD) yang diminta Kemendagri, lihat saja prosesnya seperti apa," ujar Ahok, kemarin (23/2).

Terkait hak angket (hak menyelidiki) yang digulirkan DPRD DKI Jakarta, Ahok mengaku santai. Meski saat ini diketahui sebanyak 75 persen anggota dewan telah menandatangani usul hak angket dan bakal disahkan lewat sidang paripurna, Selasa (24/2). Namun Ahok tak mau ambil pusing. "Enggak apa-apa, silakan saja," tandas dia.

Ahok malah berencana berkiriman surat kepada dewan. Surat berisikan pertanyaan tentang 'anggaran siluman' atas temuan BPKP (Badan Pengawas Keuangan Pembangunan) DKI Jakarta selama dua tahun lalu.

Oleh karena itu, Ahok menegaskan, akan menggunakan sistem e-budgeting dalam penyusunan APBD DKI 2015, sehingga tidak perlu penandatanganan ketua DPRD DKI dan pembahasan bersama komisi setelah pengesahan APBD DKI.

"Kami juga akan kirim surat kepada DPRD, menyatakan mereka setuju ada temuan BPKP selama dua tahun yang mengatakan ada anggaran siluman dulu. Makanya, dari temuan anggaran siluman itu kami mau buat e-budgeting, itu saja yang kita lakukan," tukas dia. (wok)

AHOK NGOTOT GUNAKAN E-BUDGETING



- Minta kejelasan dari Kemendagri
- Hindari masuknya dana siluman

TEMUAN BPK

- Anggaran Siluman 2013
 - Dinas Kesehatan
 - Dinas Pendidikan
 - Dinas Pekerjaan Umum
- Anggaran Siluman 2014
 - Dinas Kesehatan
 - Dinas Pekerjaan Umum

GIMBAL/INDOPOS